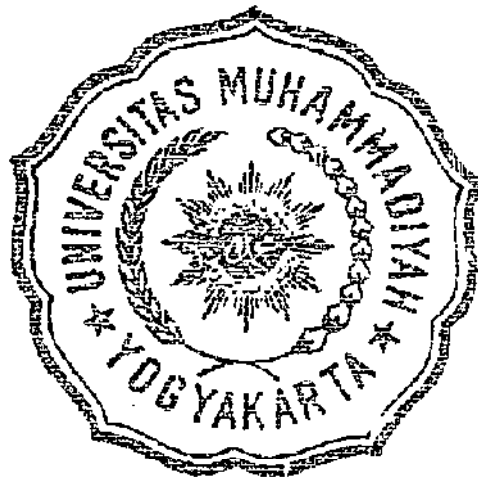


**PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : SUTARTO

NIM : 20610143

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DI JAWA TENGAH**

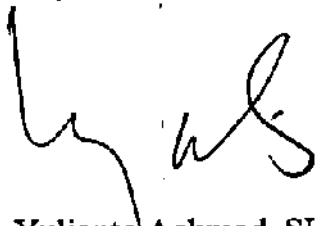
SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama : Sutarto
NIM : 20610143

telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 8 April 2005

Dosen Pembimbing I



Yulianto Achmad, SH., MH.
NIM 101 012 001

Dosen Pembimbing II



Nanik Prasetyoningsih, SH.
NIM 101 012 012

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure the integrity and availability of data.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of a data governance committee in establishing policies and standards for data management.

6. The sixth part of the document outlines the key components of a data governance framework, including data ownership, data access, and data retention policies.

7. The seventh part of the document discusses the role of data governance in ensuring compliance with various regulations and standards, such as GDPR and HIPAA.

8. The eighth part of the document discusses the importance of data literacy and the need for training and education to ensure that all employees understand the value and proper use of data.

**PENEGAKAN KEMERDEKAAN PERS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

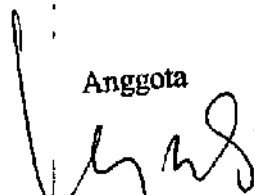
telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 29 April 2005
yang terdiri dari :

Ketua




Anang Sya'roni, SH., M.Hum.
NIP. 131.415.402

Anggota



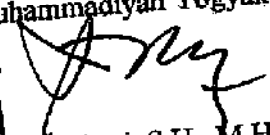
Yulianto Achmad, SH., MH.
NIP. 131.847.701

Anggota



Nanik Prasetyomingsih, SH.
NIK. 153.043

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
NIK. 153.027

HALAMAN MOTTO

“Wahai orang yang beriman, taqwalah kepada Allah dengan taqwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keislaman”. (QS: Ali-Imran ayat 102).

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS: An-Nāhī ayat 97).

“Ragutlah orang yang menemukannya di dalam catatan amalannya istiafar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ◆ Kedua orang tuaku tercinta.
- ◆ Saudara-saudaraku.
- ◆ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia ni'matnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir pada program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis Skripsi dengan judul "Penegakan Kemerdekaan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Di Jawa Tengah" dilatarbelakangi minat penulis terhadap perkembangan pers di Indonesia. Mengingat peran pers sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara demokrasi. Di mana pers merupakan pilar keempat (*the fourth estate*) dalam mewujudkan demokrasi pada suatu negara setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku.
2. Bapak Yulianto Achmad, SH., MH. selaku dosen pembimbing I Tugas Akhir.
3. Ibu Nanik Prasetyoningsih, SH. selaku dosen pembimbing II Tugas Akhir.
4. Bapak Dodhy Yulianto, beserta staff dan karyawan Suara Merdeka Perwakilan/Magelang Jawa Tengah.
5. Bapak Mufid, beserta staff dan karyawan Wawasan Perwakilan/Magelang Jawa Tengah.

6. Bapak Tuhu Prihantoro (Wartawan Suara Merdeka) yang telah banyak meluangkan waktu membantu terselesainya Skripsi ini.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga selesainya Tugas Akhir ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Pustaka.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II PERS, DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

A. Pengertian Pers Dan Fungsi Pers.....	15
B. Sistem Pers.....	21
C. Kemerdekaan Pers Dan Demokrasi.....	26
1. Kemerdekaan Pers.....	26
2. Demokrasi.....	

D. Peran Pers Dalam Negara Hukum.....	32
---------------------------------------	----

BAB III KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Pers Nasional.....	35
1. Perkembangan Pers Tahun 1945-1956.....	35
2. Perkembangan Pers Pada Tahun 1957-1965.....	36
3. Perkembangan Pers Periode 1966-1999.....	36
4. Sejarah Perkembangan Pers Periode 1999.....	39
B. Sistem Pers Yang Berlaku Di Indonesia.....	40
1. Kebijakan Pemerintah.....	41
2. Sistem Pers yang Pernah Berlaku di Indonesia.....	46
C. Perkembambangan Pers Dalam Perundang-undangan.....	49
D. Lembaga Pemantau Media.....	57
E. Kemerdekaan Pers Di Indonesia.....	58

BAB IV PENEKAKAN KEMERDEKAAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI JAWA TENGAH

A. Penekakan Kemerdekaan Pers.....	66
B. Kendala Realisasi Kemerdekaan Pers.....	72
C. Solusi.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75